

## Daftar Pustaka

### Buku

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018.
- Erwin, M., *Filsafat Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Hamzah, A., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hamzah, A., dan Surachman, R.M., *Pre-Trial Justice dan Discretionary dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Harahap, M. Y., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 193.
- Machmudin, Dudu D., *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Mahfud, Moh. M., *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998.
- Marpaung, L., *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Marzuki, Peter M., *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Nurdjana, IGM, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Pane, Musa D. dan Situmeang, Sahat M. T., *Asas-asas Berpikir Logika dalam Hukum*, Penerbit Cakra, Bandung, 2018.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212–220.
- Soesilo, R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politica Bogor, Bogor, 1980.
- Sovia, Shelya N., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, 2022.
- T. Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Zainudin, Hasan, *Pendidikan Anti Korupsi*, Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2025.

### **Perundang-undangan**

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 9). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188).
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1).

### **Jurnal Ilmiah**

- Adam, Haidar, "Dissenting Opinion dan Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2017, hlm. 312.
- Alcadini Wijayanti, "Perkembangan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Khusus dan Implikasi Yuridis terhadap KUHAP," *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 4, 2012, hlm. 3.
- Andini, Orin A., "Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi," *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 133–148.

- Andrea Kendall dan Kimberlly Cuff, "Obstruction of Justice," *The American Criminal Law Review*, Vol. 45, No. 2, 2008, hlm. 766–767.
- Angesti, Dian dan Pudji Astuti, "Studi Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN Bjn Tentang Tindak Pidana Pencurian Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Satu Tahun," *Jurnal Hukum Novum*, Vol. 6, No. 3, 2019, hlm. 140–141.
- Arfiani; Syofyan, Syofirman; dan Delyarahmi, Sucy. *Problematika Penegakan Hukum Delik Obstruction of Justice dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Swara Justisia*, Vol. 6, No. 4, Januari 2023, hlm. 523.
- Aulia, Keysha N., Lestari, Ayu, Latief, Lika M., dan Fajarwati, Noerma K., "Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi," *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2, No. 1, Februari 2024, hlm. 713–724.
- Cornelia Leasa, Cynthia, Sherly Adam, dan Jacob Hattu, "Penyelidikan dan Penyidikan dalam Perkara Pidana," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Vol. 4, No. 6, 2024, hlm. 479–488.
- Hamzah, Diwa P. F., "Efektifitas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindak Pidana Suap Menyuap oleh Pejabat Negara," *Maleo Law Journal*, Vol. 8, No. 1, April 2024, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, hlm. 80.
- Hanik, Nurul W., "Fungsi Hukum Pidana," *Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 8–15.
- Hasana, Elok F., "Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2, No. 12, Desember 2024, hlm. 5.
- Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa," *Jurnal Ilmu Hukum Legalitas*, Vol. 3, No. 3, 2017, hlm. 330.
- Ismail, "Fungsi Penyidik KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol. 1, 2013, hlm. 3.
- Jodi, Faris F., "Pemberatan Pidana bagi Pelaku Obstruction of Justice dalam Upaya Memberikan Dampak Positif Kinerja Penegak Hukum," *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, Vol. 25, No. 1, April 2024, hlm. 110–123.
- Karisa, Immaculata A., "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)," *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 162.

- Kevin Nurrurachman, Syadid Jiddan Alharun, Agrez Aprianti, Riqa Kurnia Sabilla, dan Kiki Amaliah, "Pendekatan Follow the Money sebagai Instrumen Pembuktian dalam Perkara Korupsi dan Pencucian Uang," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 298.
- Lubis, Andi H. dan Hasbi, Mhd., "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 12, Januari 2024, hlm. 356–360.
- Lubis, Fauziah dan Sinaga, Juliana P. C., "Analisis Obstruction of Justice dalam Perspektif Hukum Pidana," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 6594.
- Malikah, Ratu Keysha, dan Astuti, Pudji. "Analisis Yuridis Tidak Terbuktinya *Obstruction of Justice* dalam Putusan Hasto Kristiyanto: Tinjauan Berdasarkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan." *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*, Vol. 4, No. 10, Oktober 2025, hlm. 9668-9669.
- Putri, Mutia H., Munawar, Akhmad, dan Aini, Muhammad, "Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana," *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 7, Juli 2023, hlm. 2.
- Ritonga, Fani Holidayani, Mohammad Ekaputra, dan Mahmud Mulyadi, "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Muncikari," *Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 333–344.
- Sari, Rosita, N., dan Fahmy Asyhari, "Analisa Yuridis Terhadap Asas Lex Specialis Systematis Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan No.95/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 279.
- Sonata, Depri L., "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 25.
- Suprayoga, Aramitha D. A., "Analisis Dampak Obstruction of Justice terhadap Proses Peradilan," *Recidive*, Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 119–238.
- Vilani, Diah R., Yunita, Niken K., Nanda, Ahmat L., dan Wijaya, David A., "Mekanisme Penyelidikan, Penyidikan dan Mengadili di Indonesia Pasca Orde Baru," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)*, Vol. 2, No. 2, Juli 2023, hlm. 107–122.
- Zamroni, M., "Implementasi Asas Pembuktian Terbalik," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 2, 2011, hlm. 290.
- Zuliah, Azmiati dan Amalia, Fitri, "Penerapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Law Jurnal*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 124–135.

**Media Online**

UMA MH, 5 Agustus 2021, Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>, (akses 29 Oktober 2025).

Humas FHUI, “Telaah Obstruction of Justice dalam Perkara Brigadir J oleh Dr. Febby Mutiara Nelson,” 18 Juni 2023, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, <https://law.ui.ac.id/telaah-obstruction-of-justice-dalam-perkara-brigadir-j-oleh-dr-febby-mutiara-nelson/>, (akses 6 Desember 2025).

Eddy O.S. Hiariej, “Obstruction of Justice dan Hak Angket DPR,” 21 Juli 2017, *Anti Korupsi Indonesia*, <https://antikorupsi.org/id/article/obstruction-justice-dan-hak-angket-dpr>, (akses 6 Desember 2025).

